

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pinggiran dengan memperkokoh daerah-daerah terutama pedesaan dalam rangka negara kesatuan merupakan sebuah program dari Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu program Nawacita. Kebijakan tersebut akan menciptakan kemakmuran sehingga dengan terciptanya kemakmuran tersebut akan bisa bersaing dalam hal pembangunan, dan juga menguatkan wilayah pedesaan.¹ Pembangunan Nasional merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan perdesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup dikawasan perdesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah perdesaan. Sedangkan menurut Widjaya, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.²

Pembangunan perdesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar

¹Hamiati dan Abdul Aziz Zulkarnain, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Ekonomi ASEAN*, (Bengkulu : UniHaz, 2017), hlm. 1

²H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.3

70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah perdesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat perdesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di perdesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh, terutama dalam upaya dalam menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di perdesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah perdesaan. Pembangunan perdesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki (sumber daya alam dan sumber daya manusia), meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, dan memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.³

Maka dari itu, pembangunan perdesaan di Indonesia mengundang tingkat lokal, nasional bahkan Internasional memperhatikan seperti lembaga perusahaan, lembaga swadaya masyarakat bahkan lembaga pendidikan. Hal kerjasama (gotong royong) dan keswadayaan merupakan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal

³Rahardjo Adisasmitha, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 63

yang mempunyai visi pada pengembangan penghormatan, penghargaan, kesetaraan, dan kemandirian yang diharapkan mampu membangun pengelolaan pemerintah desa yang tertata.⁴

Pengelolaan desa melalui pemerintahan desa agar menjadi desa yang lebih maju, dan sejahtera masyarakatnya, itu merupakan impian dari semua pemerintah desa di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan kepada pemerintah yang berkuasa untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁵ Artinya, masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan pemerintah bebas untuk membuat kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

Sedangkan keadaan perekonomian sosial masyarakat desa masih sangat mengalami kekurangan atau mengalami keterbelakangan modal. Faktor jaringan sosial, jembatan sosial, dan ikatan sosial merupakan modal sosial masyarakat desa, yang ketiga faktor tersebut sangat tidak mencukupi dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi di perdesaan.⁶ Pembangunan nasional setiap desa melakukan pembangunan secara mandiri merupakan hakikat dari pembangunan desa. Penerapan otonomi daerah yang menggunakan asas desentralisasi sudah dijelaskan oleh UU No. 23 Tahun 2004. Daerah melakukan pemerintahan yang

⁴ Gabriela Hanny Kususma dan Nurul Purnamasari, *Bumdes : Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*, (Yogyakarta : Penabulu Foundation, 2016), hlm. 2

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945

⁶ Gabriela Hanny Kususma dan Nurul Purnamasari, *Bumdes : Kewirausahaan...*, hlm. 2

efektif dan mandiri dalam mewujudkan kesejateraan masyarakat pelosok, merupakan kewenangan dari otonomi daerah itu sendiri.⁷

Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah-satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi perdesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.⁸

Pengembangan produktivitas ekonomi di perdesaan sebenarnya sudah diupayakan pemerintah, akan tetapi kecapaiannya belum maksimal. Kurangnya semangat masyarakat dalam berwiraswasta (membuka usaha sendiri) merupakan salah satu faktor yang menyebabkannya. Selain itu, campur tangan pemerintah yang tinggi, menyebabkan inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam menjalankan dan memelihara roda perekonomian di perdesaan jadi terhambat.

⁷Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 3

⁸Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta : Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), 2017), hlm. 1

Peran dari pemerintah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin yaitu dengan mengembangkan perekonomian masyarakatnya, dimana peran dari perkembangan ekonomi inilah yang menjadi dasar untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat tokoh dari Rahardjo yang berpendapat bahwa pengembangan wilayah yang komprehensif tujuan utamanya untuk: (1) meningkatkan pemerataan dalam tingkat pertumbuhan (ekonomi) antar wilayah, (2) meningkatkan pemerataan dalam tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dan (3) memperkokoh struktur perekonomian. Sehingga perekonomian desa merupakan perekonomian tradisional yang ada pada suatu desa.⁹

Dalam penelitian di Kecamatan Tanggunggunung, rata-rata mata pencaharian penduduk disana merupakan petani jagung dan pisang, peternakan, membuka toko sembako, kuli bangunan, serta ada juga usaha rumahan pembuat kripik singkong dan kripik pisang. Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung membantu masyarakatnya dalam kegiatan usaha mereka agar dapat berkelanjutan untuk jangka panjang dengan cara menyediakan dana atau modal untuk tujuan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan produktivitas pertaniannya serta usaha kripik singkong/pisangnya ataupun pekerjaan lainya yang sedang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Tanggunggunung. Dana yang

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 3

disediakan dikhususkan untuk masyarakat yang mempunyai usaha sehingga dana yang dipinjamkan dapat berputar dan dapat dikembalikan sesuai aturan yang berlaku dengan sistem tanggung renteng tanpa agunan/jaminan.

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung mencakup 7 desa, yaitu Desa Ngrejo, Desa Jengglunharjo, Desa Kresikan, Desa Tanggunggunung, Desa Ngepoh, Desa Tengharejo, dan Desa Pakisrejo dengan alokasi dana dari pengembangan aset PNPM Mandiri. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) salah satu kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini merupakan kegiatan peminjaman modal untuk kelompok usaha di semua desa se-Kecamatan Tanggunggunung. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan pembahasan mengenai Upaya Peningkatan Perekonomian Dan Produktivitas Masyarakat Melalui Pinjaman Kredit Oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari latar belakang di atas yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung merupakan program lembaga keuangan ditingkat kecamatan dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

2. Minimnya relasi dan kesulitan dalam pemasaran produk pinjaman kreditnya, yang terdiri dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
3. Masih adanya masalah atau kendala dalam operasional Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung.
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana pinjaman kredit sebagai modal usaha masyarakat.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena permasalahan dalam latar belakang di atas maka fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dan persyaratan produk pinjaman kredit yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung ?
2. Bagaimana upaya produk pinjaman kredit yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat Kecamatan Tanggunggunung?
3. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung serta solusi permasalahan dalam penyaluran produk pinjaman kredit ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme dan persyaratan produk pinjaman kredit yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung.
2. Untuk mengetahui upaya produk pinjaman kredit yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat Kecamatan Tanggunggunung.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung serta solusi permasalahan dalam penyaluran produk pinjaman kredit.

E. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terfokus dan tidak mencangkup hal yang luas maka ruang lingkup yang akan diteliti seputar strategi untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi dan juga produktivitas masyarakat dengan pinjaman kredit yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung, untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat diambil manfaatnya, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini bisa digunakan sebagai usaha untuk mengemukakan perkembangan teori ekonomi dalam bidang ekonomi pembangunan. Para

pembaca bisa menjadikan ini sebagai penambah informasi dan referensi dalam hal upaya peningkatan perekonomian dan produktivitas masyarakat melalui pinjaman kredit oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai sumber wawasan dan pengalaman, serta melatih dalam bertanggungjawab.

b. Bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama

Hasil dari penelitian ini mampu membawa manfaat yang berguna bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung maupun Pemerintah Kecamatan Tanggunggunung. Sehingga dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Tanggunggunung dan mengevaluasi program-program desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanggunggunung.

G. Penegasan Istilah

Agar terhindar terjadinya kesalahan dalam mengartikan judul skripsi ini, oleh karena itu peneliti memberikan penegasan istilah serta batasan pembahasan :

1. Definisi Konseptual

- a. Peningkatan perekonomian merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita dan kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang

(misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).¹⁰ Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara atau wilayah dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita.¹¹

- b. Produktivitas merupakan penyediaan barang maupun jasa yang terus meningkat dengan membutuhkan orang banyak, dengan menggunakan sumber daya yang sedikit. Produktivitas merupakan usaha penggabungan konsepsi efisiensi usaha (fisik) dengan kapasitas sumber daya alam.¹² Selain itu, produktivitas merupakan usaha maupun sikap kita dalam berupaya menghasilkan produksi lebih baik dari kemaren, dan terus berusaha agar kedepannya lebih baik dari hari ini.¹³
- c. Pinjaman kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga.¹⁴

¹⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 1999), hlm. 12

¹¹ Laurensius Julian Purwanjana Putra, *Rumus Praktis Menguasai Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Boo Publisher, 2010), hlm. 115

¹² Zulkifar Bagus Pambuko, Nurodin Usman, dan Lilik Andriyani, *Analisis Produktivitas Finansial dan Sosial Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Magelang : UNIMMA PRESS, 2019), hlm. 21

¹³ Justine T. Sirait, *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, (Jakarta : Grasindo), hlm. 247

¹⁴ A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta : Sentralisme Production, 2006), hlm. 131

d. Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi di tingkat kecamatan. Lembaga ekonomi yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam pengupayaan peningkatan perekonomian desa serta membangun rasa sosial masyarakat yang dibentuk karena kebutuhan masyarakat dan potensi desa (kearifan lokal).¹⁵

2. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional yang dimaksud dari upaya dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat melalui pinjaman kredit oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung, untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat Kecamatan Tanggunggunung serta mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung dalam membantu meningkatkan perekonomian dan mengasah produktivitas masyarakat Kecamatan Tanggunggunung yang mencakup tujuh desa, yaitu Desa Ngrejo, Desa Jengglunharjo, Desa Kresikan, Desa Tanggunggunung, Desa Ngepoh, Desa Tenggarejo, dan Desa Pakisrejo.

¹⁵ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 35

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, maka dipandang perlu adanya sistematika pembahasan. Pembahasan dalam skripsi yang berjudul Upaya Peningkatan Perekonomian dan Produktivitas Masyarakat Melalui Pinjaman Kredit Oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang meliputi tinjauan tentang pengertian dan tujuan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam meningkatkan perekonomian dan produktivitas masyarakat, usaha-usaha yang dijalani masyarakat, pinjaman kredit yang disediakan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta terdapat penelitian terdahulu.

Bab ketiga, menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, merupakan hasil penulisan yang berisi tentang gambaran deskripsi latar belakang obyek penelitian, paparan data serta temuan penelitian.

Bab kelima, merupakan pembahasan penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

Bab Keenam, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran/rekomendasi. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.